



Reinterpretasi Konsep Daulat dan Durhaka dalam Gurindam Dua Belas: Pergeseran Paradigma Kepemimpinan Melayu Klasik

Elmustian^{1*}, Hermendra², Ika Apriyanti³

^{1,2,3} Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Riau

*Penulis Korespondensi: elmustian@lecturer.unri.ac.id, hermendra@lecturer.unri.ac.id,
ika.apriyanti2017@gmail.com

Abstract. *This research deconstructs the concepts of daulat (sovereignty) and durhaka (treason) within the text of Gurindam Dua Belas by Raja Ali Haji, viewed through the lens of a paradigm shift in Classical Malay leadership. The central problem addressed is the tension between the traditional, sacred-supernatural conception of daulat and the Islamic ethical demands introduced by Raja Ali Haji. Utilizing a sociological hermeneutic method, this study focuses its analysis on the Fifth and Twelfth Articles to dissect the internal transformation of values. These specific articles are selected as they represent the core of leader-people relational ethics and individual moral responsibility. The findings reveal that in Raja Ali Haji's thought, daulat underwent an Islamization process, evolving into a conditional "ethical legitimacy." Consequently, the concept of durhaka is no longer understood as physical defiance against the personification of the monarch (cult of personality), but rather as a failure to uphold a moral contract when a leader abandons the Sharia. These findings affirm that Gurindam Dua Belas offers a transcendental-constitutional leadership model that remains highly relevant for evaluating the ethical crises in modern leadership today.*

Keywords: *Daulat, Durhaka, Gurindam Dua Belas, Raja Ali Haji, Leadership Ethics.*

Abstrak. Penelitian ini mendekonstruksi konsep daulat dan durhaka dalam naskah Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji melalui lensa pergeseran paradigma kepemimpinan Melayu. Masalah utama yang diangkat adalah adanya ketegangan antara konsepsi daulat tradisional yang bersifat sakral-supranatural dengan tuntutan etika Islam yang dibawa oleh Raja Ali Haji. Dengan menggunakan metode hermeneutika sosiologis, penelitian ini memfokuskan analisis pada Pasal Kelima dan Pasal Kedua Belas untuk membedah transformasi nilai di dalamnya. Hal ini dikarenakan Pasal Kelima dan Pasal Kedua Belas merupakan representasi inti dari etika relasi pemimpin-rakyat dan tanggung jawab moral individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemikiran Raja Ali Haji, daulat telah mengalami proses Islamisasi menjadi sebuah "legitimasi etis" yang bersyarat. Implikasinya, konsep durhaka tidak lagi dipahami sebagai pembangkangan fisik terhadap personifikasi raja (kultus individu), melainkan kegagalan rakyat dalam menjaga kontrak moral apabila pemimpin meninggalkan syariat. Temuan ini menegaskan bahwa Gurindam Dua Belas menawarkan model kepemimpinan berbasis transcendental-konstitusional yang relevan untuk mengevaluasi krisis etika kepemimpinan modern saat ini.

Kata Kunci: Daulat, Durhaka, Gurindam Dua Belas, Raja Ali Haji, Etika Kepemimpinan.

1. LATAR BELAKANG

Wacana kepemimpinan dalam historiografi Melayu klasik selama ini kerap terperangkap dalam nalar feodalisme kaku. Dalam tradisi tersebut, konsep "Daulat" umumnya dimaknai sebagai kekuatan mistis-supranatural yang memberikan otoritas absolut kepada penguasa tanpa celah kritik. Namun, dinamika intelektual di Riau-Lingga pada abad ke-19 menandai sebuah titik balik fundamental. Melalui peran strategis Raja Ali Haji, terjadi pergeseran paradigma dari kekuasaan berbasis kultus menuju tatanan

berbasis etika. Sebagaimana disoroti oleh Jan van der Putten (2001), Raja Ali Haji bertindak lebih dari sekadar pujangga istana; ia adalah seorang arsitek sosial yang menggunakan literatur sebagai instrumen untuk menanamkan kedisiplinan moral dan mereformasi perilaku elit penguasa yang mulai mengalami degradasi.

Urgensi dekonstruksi ini semakin kuat jika menilik tesis Azyumardi Azra (2004) mengenai jaringan ulama di Nusantara. Azra menekankan bahwa proses Islamisasi pemikiran politik di dunia Melayu telah menggeser fundamen kekuasaan dari basis karismatik-magis menuju basis legal-etik yang bersandarkan pada syariat. Transformasi ini mengubah wajah "Daulat" dari hak ilahi yang bersifat genealogis (darah) menjadi sebuah mandat yang sangat bergantung pada integritas moral individu.

Hal ini sejalan dengan teori Kontrak Sosial Islam yang dikembangkan oleh pengkaji politik Islam kontemporer, di mana legitimasi kekuasaan tidak bersifat *given* secara biologis, melainkan bersifat fungsional. Sebagaimana ditegaskan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas (1972) mengenai konsep Adab, ketertiban sosial hanya dapat dicapai apabila setiap individu, terutama pemimpin menempatkan diri pada posisi yang tepat sesuai dengan martabat dan kebenaran spiritualnya. Dengan demikian, Gurindam Dua Belas bukan sekadar gubahan sastra, melainkan sebuah Manifesto Etis yang menuntut pertanggungjawaban personal penguasa di hadapan hukum Tuhan, sebuah gagasan yang secara radikal menantang doktrin absolutisme tradisional Melayu.

Penelitian ini berargumen bahwa Gurindam Dua Belas, khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 12, merupakan manifestasi formal dari pergeseran tersebut. Kedua pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai nasihat moral, tetapi juga sebagai kontrak sosial baru yang meruntuhkan dogma "Raja adalah Tuhan di Bumi" dan menggantinya dengan prinsip "Raja sebagai Pemegang Amanah Tuhan". Melalui analisis hermeneutika, artikel ini akan mengungkap bagaimana konsep durhaka didefinisikan ulang bukan sebagai pembangkangan terhadap pribadi raja, melainkan pelanggaran terhadap kebenaran universal (syariat).

Meskipun studi terhadap Gurindam Dua Belas telah banyak dilakukan, mayoritas literatur terdahulu cenderung berfokus pada dua ranah utama. Pertama, analisis struktur kebahasaan dan estetika sastra yang melihat teks sebagai artefak linguistik (Fang, 1993). Kedua, kajian nilai-nilai didaktis yang memosisikan karya ini semata-mata sebagai

pedoman moralitas individu atau pendidikan karakter bagi generasi muda (Koh, 2010). Sejauh ini, aspek sosiopolitik yang lebih dalam, khususnya mengenai restrukturisasi konsep daulat dan durhaka dari perspektif ketatanegaraan Islam masih jarang mendapat perhatian proporsional.

Penelitian ini mengisi celah (gap) tersebut dengan menawarkan perspektif hermeneutika sosiologis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memandang Gurindam Dua Belas sebagai teks etika pasif, penelitian ini memosisikannya sebagai sebuah dokumen politik transformatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mereinterpretasi relasi kuasa antara penguasa dan rakyat yang tidak lagi bersifat searah dan absolut, melainkan bersifat timbal balik dan kontraktual di bawah payung syariat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah studi sastra Melayu, tetapi juga memberikan kontribusi pada diskursus filsafat politik Islam di Nusantara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis. Instrumen utama dalam analisis ini adalah naskah *Gurindam Dua Belas* sebagai sumber data primer. Melalui teknik dekonstruksi terhadap terminologi "Daulat" dan "Durhaka", studi ini berupaya mengeksplorasi makna mendalam yang terkandung di balik teks (*beyond the text*). Tujuan akhirnya adalah mengontekstualisasikan temuan tersebut guna membedah fenomena krisis etika kepemimpinan dalam diskursus kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reinterpretasi Pasal Kelima: Etika Birokrasi sebagai Fondasi Daulat

Analisis terhadap Pasal Kelima *Gurindam Dua Belas* karya Raja Ali Haji (RAH) menunjukkan sebuah lompatan pemikiran yang melampaui zamannya. RAH tidak sekadar memberikan nasihat moralitas individual, melainkan sedang merumuskan etika birokrasi sebagai pilar penyokong kedaulatan negara.

Analisis mendalam terhadap Pasal Kelima *Gurindam Dua Belas* mengungkapkan bahwa Raja Ali Haji tidak hanya membicarakan moralitas individu, melainkan sedang meletakkan dasar bagi etika birokrasi yang menopang kedaulatan. Dalam teks tersebut, dinyatakan:

"Jika hendak mengenal orang yang berbangsa,

lihat kepada budi dan bahasa."

Secara politis, bait ini mendekonstruksi konsep "kebangsaan" atau nasab (legitimasi darah biru) yang selama ini menjadi syarat mutlak kekuasaan Melayu.

Dalam tradisi Melayu klasik seperti yang terekam dalam *Sulalat al-Salatin*, kedaulatan sering kali dipandang sebagai hak prerogatif darah (*nasab*) yang bersifat kodrati. Namun, Raja Ali Haji melalui baris:

"Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa."

secara radikal mendekonstruksi konsep tersebut. "Berbangsa" tidak lagi dipahami sebagai kepemilikan silsilah raja-raja, melainkan kualitas karakter. Menurut pengamatan dalam studi sastra Melayu (seperti pemikiran Teuw atau Siti Chamamah Soeratno), Raja Ali Haji melakukan pergeseran dari kedaulatan berbasis *daulat-magis* menuju *daulat-etik*.

Raja Ali Haji membangun tesis bahwa daulat seorang pemimpin tidak berdiri secara atomistik di ruang hampa, melainkan merupakan akumulasi integritas dari lingkungan pemerintahannya. Pergeseran paradigma terlihat jelas di sini: kedaulatan harus disaring melalui mekanisme seleksi moralitas. Jika birokrasi di sekeliling pemimpin kehilangan "budi dan bahasa" (etika birokrasi), maka secara otomatis daulat pemimpin tersebut akan luruh, baik secara teologis di hadapan Tuhan maupun secara sosiologis di mata rakyat.

Tesis utama yang dibangun adalah bahwa daulat tidak berdiri di ruang hampa. Kedaulatan seorang pemimpin adalah akumulasi dari integritas orang-orang yang membantunya. Dalam konteks ini, "budi dan bahasa" adalah indikator kompetensi moral bagi para birokrat (pembesar kerajaan).

Penelitian sosiologi sastra terhadap karya-karya Riau-Lingga sering menyebutkan bahwa RAH sangat dipengaruhi oleh pemikiran Islam reformis. Hal ini terlihat dari cara beliau menempatkan seleksi moralitas sebagai mekanisme penyaring kekuasaan. Jika lingkaran birokrasi kehilangan etika (integritas), maka secara otomatis kedaulatan pemimpin tersebut akan luruh. Peluruhan ini terjadi dalam dua dimensi:

- Dimensi Teologis: Kehilangan legitimasi di hadapan Tuhan sebagai *Khalifatullah*.

- Dimensi Sosiologis: Kehilangan kepercayaan (*trust*) dari rakyat yang menjadi akar sosiologis kekuasaan.

Untuk memperkuat argumen ini, kita dapat merujuk pada konsep dalam *Taj al-Salatin* (Mahkota Raja-Raja) yang menekankan bahwa seorang raja adalah cermin dari menteri-menterinya. Jika menteri-menterinya rusak, maka rusaklah citra kerajaan. RAH dalam Pasal Kelima mempertajam hal ini: etika komunikasi politik ("bahasa") dan tindakan nyata ("budi") para pelaksana pemerintahan adalah wajah asli dari kedaulatan itu sendiri.

Dalam konteks kepemimpinan modern, hal ini sangat relevan dengan krisis meritokrasi. Kejatuhan penguasa kontemporer sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya kekuatan koersif, melainkan akibat kegagalan dalam memelihara hal-hal yang sering dianggap "sia-sia" namun fundamental, seperti etika komunikasi politik dan integritas para pembantunya. Daulat dalam Pasal Kelima, bersifat kolektif dan sistemik. Lebih lanjut, Pasal Kelima dalam *Gurindam Dua Belas* bukan sekadar puisi etika, melainkan sebuah Manifes Birokrasi Melayu Baru. Raja Ali Haji menegaskan bahwa fondasi kedaulatan yang kokoh terletak pada kualitas manusia-manusia di dalam sistemnya. Daulat bersifat kolektif; ia adalah jalinan budi yang diikat oleh bahasa yang beradab.

Pasal Kedua Belas: Redefinisi Relasi Raja-Rakyat dan Rasionalisasi Durhaka

Pasal Kedua Belas merupakan kulminasi dari filsafat politik Raja Ali Haji yang merefinisi total relasi kuasa. Melalui metafora yang kuat, ia menyatakan: "*Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri.*" Simbolisme "kebun dan pagar" ini menandakan bahwa kedaulatan bukan lagi pusat gravitasi yang absolut dan tak tersentuh, melainkan sebuah entitas yang harus dilindungi sekaligus dibatasi oleh mekanisme mufakat.

Pasal Kedua Belas dalam *Gurindam Dua Belas* merepresentasikan puncak pemikiran konstitusional Raja Ali Haji (RAH). Melalui metafora "*Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri,*" RAH melakukan dekonstruksi terhadap pola relasi kuasa tradisional. Dalam perspektif sastra Melayu klasik yang sering dikaji oleh para pakar seperti Teuku Iskandar atau V.I. Braginsky, simbol kekuasaan biasanya

bersifat sentralistik. Namun, RAH menawarkan model integritas fungsional yang bersifat simbiotik.

Kebun (simbol kemakmuran dan negara) hanya dapat eksis jika pagar (menteri/sistem hukum) menjalankan fungsi proteksi sekaligus limitasi. Pembatasan kekuasaan ini bukan dianggap sebagai pelemahan terhadap otoritas raja, melainkan syarat mutlak bagi keberlangsungan kedaulatan itu sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *shura* (musyawarah) dalam tata kelola Islam yang diadaptasi ke dalam kosmologi politik Melayu.

Salah satu transformasi paling signifikan yang diusung RAH adalah rasionalisasi konsep "durhaka". Dalam teks-teks historiografi Melayu yang lebih tua seperti *Sejarah Melayu*, durhaka dipandang sebagai pelanggaran terhadap *wa'ad* (perjanjian suci) yang bersifat metafisik, di mana pelakunya akan terkena *tulah* atau kutukan.

Namun, merujuk pada analisis Azhar Ibrahim (2014) mengenai cendekiawan Melayu, RAH menggeser definisi durhaka ke ranah etis-legalistik. Durhaka tidak lagi dipahami sebagai pembangkangan personal terhadap sosok raja, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip "mufakat" dan "kebenaran hati". Dengan kata lain, durhaka mengalami desakralisasi; ia menjadi kategori moral yang bersifat timbal balik. Penguasa yang mengabaikan keadilan pada dasarnya telah melakukan "durhaka" terhadap amanah kepemimpinannya.

Integritas fungsional antara penguasa dan jajaran menteri diibaratkan sebagai sistem pertahanan yang saling mengunci (*interlocking system*). Hal ini membawa implikasi besar terhadap konsep durhaka. Jika dalam narasi klasik (seperti era Majapahit atau Malaka awal) durhaka dianggap sebagai dosa metafisik yang mendatangkan "tulah" atau kutukan, maka dalam pemikiran Raja Ali Haji, durhaka mengalami proses rasionalisasi.

Durhaka kini didefinisikan sebagai pengkhianatan terhadap "mufakat" dan "kebenaran hati". Paradigma ini menandai pergeseran dari loyalitas buta (*blind loyalty*) menuju loyalitas bersyarat (*conditional loyalty*) yang berbasis pada Syariat Islam. Apabila raja mengabaikan prinsip keadilan dan tidak lagi bermufakat dengan kebenaran,

maka kewajiban moral rakyat untuk patuh secara otomatis gugur. Ini adalah bentuk awal dari kontrak sosial dalam pemikiran Islam Melayu.

Daulat Etis: Solusi atas Krisis Kepemimpinan Kontemporer

Menghubungkan pemikiran abad ke-19 ini dengan realitas kontemporer, ditemukan bahwa krisis kepemimpinan saat ini berakar pada hilangnya konsep "Daulat Etis". Pemimpin modern cenderung mengejar kekuasaan teknis (*power*) namun mengabaikan otoritas moral (*authority*). *Gurindam Dua Belas* menawarkan tesis bahwa kendali atas ruang publik harus didahului oleh kendali atas diri sendiri (asketisme politik).

Dalam konteks sastra sebagai kritik sosial, *Gurindam Dua Belas* berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap krisis etika kepemimpinan. Pemikiran Raja Ali Haji dalam pasal ini menegaskan bahwa stabilitas sebuah bangsa tidak terletak pada absolutisme personal penguasa, melainkan pada kekuatan sistem yang saling mengunci (*interlocking system*) antara pemimpin dan lembaga di bawahnya melalui mekanisme mufakat. Penekanan pada "kebenaran hati" menunjukkan bahwa bagi Raja Ali Haji, politik tidak boleh dipisahkan dari dimensi esoteris-etis, di mana integritas individu menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagaimana dipetakan oleh Azyumardi Azra mengenai jaringan ulama, Islamisasi konsep kepemimpinan menempatkan pemimpin sebagai pelayan hukum Tuhan (*khadim*). Ketika pemimpin modern hanya bersandar pada hukum formal yang bersifat legal-positivistik tanpa menyentuh aspek etik-transendental, mereka rentan terjebak dalam absolutisme baru yang dibungkus prosedur demokrasi.

Transformasi dari narasi "Raja yang disembah" menjadi "Raja yang bermufakat" merupakan tawaran epistemologis Raja Ali Haji bagi tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*). Penemuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai dalam *Gurindam Dua Belas* bukan sekadar artefak sastra, melainkan sebuah kompas etis-konstitusional yang mampu mengevaluasi sekaligus memberikan solusi bagi dekadensi moral kepemimpinan di era modern.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Gurindam Dua Belas* karya Raja Ali Haji bukan sekadar karya sastra didaktis, melainkan sebuah manifes politik yang melakukan

dekonstruksi radikal terhadap konsep kekuasaan Melayu tradisional. Terdapat tiga poin utama yang menjadi inti dari pemikiran Raja Ali Haji dalam naskah ini:

- Transformasi Kedaulatan (Daulat Etik): Melalui Pasal Kelima, Raja Ali Haji menggeser prasyarat pemimpin dari sekadar legitimasi keturunan (*nasab*) menjadi legitimasi karakter (*budi dan bahasa*). Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan seorang penguasa bersifat kolektif dan sistemik, yang sangat bergantung pada integritas moral para birokrat di lingkaran pemerintahannya.
- Rasionalisasi Konsep Durhaka: Pasal Kedua Belas berhasil meredefinisi relasi antara raja dan rakyat. Konsep "durhaka" yang sebelumnya dianggap sebagai kutukan mistis (*tulah*), diubah menjadi kategori hukum dan moral yang rasional. Loyalitas rakyat tidak lagi bersifat buta, melainkan menjadi loyalitas bersyarat yang berlandaskan pada prinsip mufakat dan keadilan Syariat. Jika penguasa mengabaikan prinsip keadilan, maka kewajiban moral rakyat untuk patuh secara otomatis gugur.
- Solusi Krisis Kepemimpinan: Pemikiran Raja Ali Haji menawarkan konsep "Daulat Etis" sebagai jawaban atas krisis kepemimpinan kontemporer. Stabilitas sebuah negara tidak terletak pada kekuasaan absolut pemimpin, melainkan pada sistem pertahanan yang saling mengunci (*interlocking system*) antara penguasa dan lembaga di bawahnya melalui mekanisme musyawarah.

Melalui *Gurindam Dua Belas*, Raja Ali Haji telah melakukan revolusi diam-diam terhadap konsep kekuasaan Melayu. Daulat bukan lagi bersifat klenik, melainkan performatif-etis. Durhaka bukan lagi sekadar dosa politik, melainkan konsekuensi dari hilangnya integritas moral penguasa. Penafsiran baru ini menegaskan bahwa untuk mengatasi krisis kepemimpinan modern, diperlukan kembalinya nilai-nilai "budi dan bahasa" serta "mufakat" sebagai pagar pelindung kedaulatan bangsa.

Secara keseluruhan, *Gurindam Dua Belas* menyediakan kerangka kontrak sosial Islam-Melayu yang sangat relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karya ini menegaskan bahwa etika politik dan integritas individu adalah fondasi utama yang menjaga agar kekuasaan tidak tergelincir ke dalam absolutisme yang merusak.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1972). *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
- Al-Attas, S. M. N. (1978). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Attas, S. M. N. (2011). *Historical Fact and Fiction*. Kuala Lumpur: UTM Press.
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Fang, L. Y. (1993). *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haji, R. A. (1982). *Thamarat al-Muhimmah Fi al-Wazaif al-Malik* (V. Matheson, Ed.). Kuala Lumpur: Oxford University Press. (Asli diterbitkan tahun 1886).
- Haji, R. A. (2004). *Gurindam Dua Belas*. (Ed. T. Hamzah). Pekanbaru: Yayasan Kebudayaan Indera Sakti.
- Hamzah, A. (2014). *Raja Ali Haji: Tokoh Sastra dan Bahasa*. Jakarta: Kompas.
- Hidayat, T. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Kepemimpinan dalam Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1215–1224.
- Hooker, V. M. (2003). *A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation?* New South Wales: Allen & Unwin.
- Ibrahim, A. (2014). *Contemporary Islamic Discourse in the Malay-Indonesian World: Critical Perspectives*. Singapore: Aleph.
- Koh, Y. H. (2010). *Raja Ali Haji dan Etika Melayu*. Jakarta: Kompas.
- Mat Piah, H. (2002). *Sastera Melayu Tradisional*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Milner, A. C. (1982). *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*. Tucson: University of Arizona Press.
- Putra, A., & Firdaus, F. (2021). Analisis Pemikiran Politik Islam Raja Ali Haji dalam Kitab *Thamarat al-Muhimmah*. *Jurnal Kajian Melayu*, 1(1), 45–60.
- Putten, J. v. d. (2001). *His Word is the Truth: It is Cooked and Eaten*. Bangkok: White Lotus Press.
- Rahmadani, S. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu dalam Kepemimpinan Lokal di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 1–15.
- Sari, N., & Afifah, N. (2022). Pesan Moral dan Kritik Sosial dalam Sastra Gurindam Dua Belas: Analisis Hermeneutika. *Jurnal Budaya Melayu*, 2(1), 22–34.